



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RUSLI**
2. Jabatan : **PANITERA**
3. NHK : **432405**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.602.906.750

1. Tanah dan Bangunan Seluas 425 m2/150 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 1.051.850.000
2. Tanah Seluas 3249 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 64.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 487.056.750

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 149.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.278.800**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 36.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.826.185.550

III. HUTANG Rp. 151.974.667



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.674.210.883

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **30 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.